

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
BELA NEGARA DI SMK SORE TULUNGAGUNG**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh :**

**KHUSNAINI**

**NIM : 201710240211012**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Juli 2019**

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BELA  
NEGARA DI SMK SORE TULUNGAGUNG**

**KHUSNAINI  
201710240211012**

Telah disetujui  
Pada hari/tanggal, **Selasa/16 Juli 2019**

Pembimbing Utama

  
**Dr. Ichsan Ansahery**

Direktur  
Program Pascasarjana



**Akhmad Fauzan'am, Ph.D**

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Abdulkadir Rahardjanto**

Ketua Program Studi  
Magister Kebijakan dan  
Pengembangan Pendidikan

  
**Dr. Agus Tinus**

# TESIS

**KHUSNAINI**  
**201710240211012**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Selasa/ **16 Juli 2019**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua : Dr. Ichsan Anshory**  
**Sekretaris : Dr. Abdulkadir Rahardjanto**  
**Penguji I : Akhsanul In'am, Ph.D**  
**Penguji II : Dr. Agus Tinus**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **KHUSNAINI**

NIM : **201710240211012**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul : **ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BELA NEGARA DI SMK SORE TULUNGAGUNG** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2019

Yang menyatakan,

  
  
**KHUSNAINI**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di Smk Sore Tulungagung“. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Rosululloh Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus, penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun material. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan wawasan dasar mengutip rujukan dan perijinan peneilitian untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agus Tinus, M.Pd selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan kesempatan dan semangat motivasi kepada penulis untuk menulis Tesis.
3. Bapak Dr. Ichsan Anshory AM, M.Pd. selaku pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran atas kesediaan dengan sabar dalam membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Abdulkadir Rahardjanto, M.Si. selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran atas kesediaan dengan sabar dalam membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua orangtua Bapak Warjiyat, Ibu Kususiyah, dan adik-adikku Muhammad Nurmansyah dan Muhammad Syamsudin

7. yang selalu memberikan dorongan, semangat, dukungan dan motivasi dengan segala kasih sayang dan pengorbanan baik materi maupun moral.
8. Hidayatul Qulidiyah, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis tepat waktu.
9. Semua rekan dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu terselesaikannya Tesis ini.

Semoga Tesis ini bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan penguatan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu saran, kritik dan kendali tetap penulis harapkan dari semua pihak atas kekurangan dan ketidaksempurnaan tesis ini.



Malang, 6 Juli 2019

Penulis

## ABSTRAK

**Khusnaini**, *Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 2019. Pembimbing Utama Dr. Ichsan Anshory. Pembimbing Pendamping Dr. Abdulkadir Rahardjanto.

Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara yang telah dilaksanakan di SMK Sore Tulungagung tahun 2014/2015 merupakan kebijakan pengembangan pendidikan karakter baru. Kebijakan tersebut harus dianalisis agar memberi gambaran jelas kepada sekolah lain efektifitas pendidikan karakter tersebut. Maka dari itu peneliti bermaksud, untuk mengetahui perencanaan kebijakan, kesesuaian implementasi dan mengevaluasi efektifitas kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung. Melalui metode penelitian kualitatif, dengan triangulasi data-data penelitian, peneliti menganalisis data dengan kajian teori melalui reduksi hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan, perencanaan penguatan pendidikan karakter Bela Negara kurang baik, sebab minimnya acuan perundangan yang dipakai, indikator ketercapaian nilai-nilai dasar karakter bela negara. Pada implementasi kebijakan dinyatakan cukup baik, terlihat adanya kegiatan-kegiatan yang mengajarkan wawasan kebangsaan pada peserta didik, namun perlu adanya pengawasan dari tim pelaksana. Terakhir, tahap evaluasi kebijakan masih kurang baik, sebab evaluasi pendidikan karakter ini berupa pelanggaran secara umum, bukan pada indikator nilai-nilai dasar Bela Negara.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan Karakter, Bela Negara

## ABSTRACT

**Khusnaini**, *Policy Analysis of Character Building Education State Defense in the Sore Vocational High School Tulungagung*. Thesis. Master's Graduate Program in Education Policy and Development, University of Muhammdiyah Malang. 2019. Main Supervisor Dr. Ichsan Anshory. Companion Supervisor Dr. Abdulkadir Rahardjanto.

Policy Analysis of Character Building Education State Defense that has been implemented in the Sore School Tulungagung year 2014/2015 is the policy of the educational development of the new characters. The policy should be analyzed in order to give a clear picture to other schools the effectiveness of the character education. Therefore the researcher intends to find out the planning policies, implementation and evaluate the effectiveness of the policy of strengthening character education State defense SMK Sore Tulungagung. Through qualitative research methods, triangulation of research data, researcher analyzed the data with the study of the theory through the reduction of results of interviews. The results obtained, reinforcement planning character education State Defense is lacking, because of the lack of reference to legislation is used, indicators of the achievement of the basic values of the characters to defend the state. On the implementation of the policy stated enough, the visible presence of activities that teach the concept of nationalism in the students, but the need for supervision of the implementation team. Last, the stage of policy evaluation is still lacking, because the evaluation of character education is in the form of violation in general, not on the indicators of the basic values of the Country's Defense.

**Keywords:** Policy, Character Education, State Defense



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN .....	1
2. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 Kebijakan Pendidikan .....	4
2.2 Penguatan Pendidikan Karakter .....	5
2.2.1 Prinsip Pendidikan Karakter .....	6
2.3 Pendidikan Bela Negara .....	7
2.3.1 Indikator Penerapan Nilai-nilai Bela Negara .....	8
3. METODE PENELITIAN .....	10
3.1 Jenis Penelitian .....	10
3.2 Tempat Penelitian .....	10
3.3 Instrument Penelitian .....	10
3.4 Sumber Data .....	10
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	11
3.6 Teknik Analisis Data .....	11
3.7 Uji Keabsahan Data.....	11
4. HASIL PENELITIAN.....	13
4.1 Perumusan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung .....	14
4.2 Kesesuaian implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung .....	17
4.3 Efektifitas Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung .....	20
5. PEMBAHASAN .....	23
5.1 Perumusan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung .....	23
5.2 Kesesuaian implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung .....	25
5.3 Efektifitas Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung .....	26

6. PENUTUP .....	27
6.1 Kesimpulan .....	27
6.2 Saran .....	27
DAFTAR RUJUKAN .....	29
LAMPIRAN .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator pencapaian sikap Bela Negara.....	31
2. Rangkaian kegiatan Bela Negara .....	32
3. Cek list sikap dasar Karakter Bela Negara .....	33
4. Bagan alur kegiatan peserta Bela Negara .....	34
5. Pengukuran wawasan kebangsaan peserta .....	35
6. Angket pasca kegiatan .....	37
7. Surat ijin penelitian .....	39
8. Tabel pengumpulan data.penelitian .....	40



## 1. Pendahuluan

Pengembangan pendidikan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional berarti mengembangkan kemampuan dan membentuk watak supaya berguna bagi Bangsa, Negara dan Agama (UU No 20, 2003). Secara lebih luasnya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak hanya itu pengembangan pendidikan merupakan implementasi dari Nawacita yaitu salah satunya dengan pendidikan revolusi karakter bangsa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » RePendidikan Indonesia, 2016). Strategisnya peran dunia pendidikan akhirnya sebagai sarana transmisi dan transformasi nilai dan ilmu pengetahuan ini dalam rangka menanamkan dan mengembangkan karakter bangsa ini (Sudrajat, 2011).

Pentingnya peran pendidikan karakter sehingga kurikulum saat ini dirancang fokus kepada pengembangan karakter (Harun, 2015). Penanaman karakter bangsa pada kurikulum K13 tergambar jelas pada desain pembelajarannya, mulai dari materi, proses hingga penilaiannya baik pada rencana kerja Sekolah serta melalui kurikulum tidak tertulis (Sahlan & Prasetyo, 2012). Tidak hanya itu, istimewanya kurikulum saat ini, memunculkan keinginan KEMENPOLHUKAM untuk memasukkan Bela Negara ke dalam pembelajaran tingkat Sekolah Menengah Atas agar dapat mendisiplinkan anak-anak muda (Azkia, 2015). Namun, rencana tersebut perlu penyesuaian dengan kurikulum 2013 sebelum akhirnya dapat dilaksanakan pada tahun 2016 (Wardi, 2016).

SMK SORE salah satunya, telah mengembangkan pendidikan karakter melalui kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara yang sudah dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015 (Observasi, 2018). Pada implementasinya, kebijakan ini merupakan kerjasama dengan BRIGIF 16 WIRAYUDHA dan dilaksanakan di luar sekolah. Pendidikan karakter dilaksanakan di luar sekolah kurang lebih 2 hari 1 malam. Penguatan pendidikan karakter Bela Negara sebagai pengembangan pendidikan karakter, seharusnya analisis kembali sebab kebijakan ini belum terinstruksi secara Nasional pada

kurikulum. Analisis proses manajemen sekolah ada 4 meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan (Triwiyanto, 2013).

Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tahapan penyusunan rencana kerja sekolah, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) baik dari perencanaan, implementasi dan evaluasi (Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo, 2009). Pada tahap perencanaan, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan landasan hukum Pendidikan Bela Negara, prinsip pendidikan karakter maupun visi misi sekolah. Pendidikan karakter sudah ditanamkan pada setiap mata pelajaran baik pada materi, proses pembelajaran maupun penilaiannya melalui kebijakan PPK (pendidikan penguatan karakter). Sebagai penguatan karakter nilai yang ditanamkan ialah Religius, Nasionalisme, Integritas, Kemandirian, Kegotongroyongan. (Kemendikbud, 2017). Sejalan pada PPK, kebijakan Bela Negara harus memperjelas penguatan pendidikan karakter yang ditekankan pada Nasionalisme, yakni sikap dan perilaku cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara, Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, memiliki kemampuan awal secara psikis dan fisik untuk Bela Negara (KEMENPOLHUKAM, 2016)

Kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara sebagai pendidikan karakter memberikan pandangan tujuan yang berbeda. Pendidikan Bela Negara identik dengan kesan perang sehingga memunculkan pandangan Bela Negara sama dengan militer (Susanti, M, 2017). Padahal menanamkan karakter salah satunya dengan kesan yang menyenangkan, berkelanjutan, secara pengembangan dan terintegrasi dalam semua mata pelajaran (Lickona, 1991). Lalu bagaimana kesesuaian implementasi Bela Negara di BRIGIF 16. Maka dari itu pada tahap implementasi harus disesuaikan kriteria tujuan Bela Negara tersebut.

Efektifitas kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara dapat dilihat dari berkurangnya pelanggaran siswa pada karakter yang ditanamkan (Rachmah, 2013). Jika kebijakan ini dilakukan pada tahun 2014/2015 maka peserta penguatan pendidikan karakter sudah dikatakan lulus dari SMK Sore. Oleh karena itu, apakah penguatan pendidikan karakter Bela Negara yang telah dilaksanakan sudah dievaluasi,. Padahal sebelum adanya Bela Negara sudah ada penguatan pendidikan 5 karakter, yang di dalamnya termasuk juga jiwa

nasionalisme. Maka seharusnya adanya gerakan karakter dasar dari Kemendikbud dapat digunakan sebagai dasar, lalu Bela Negara sebagai penguatan karakter lanjut (Anggara, 2014). Oleh karenanya adanya analisis ini, bertujuan menformulasikan kebijakan baru dalam program Bela Negara yang disesuaikan di lingkup SMA/K agar kebijakan tersebut selanjutnya dapat dilaksanakan kembali. Baik fokus tujuan dan sasarannya juga sinergi antara penguatan pendidikan karakter dengan Bela Negara.

Berbagai masalah pengembangan pendidikan penguatan pendidikan karakter Bela Negara, menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung. Berbagai persoalan dalam pembuatan kebijakan tersebut cukup banyak. Maka dari itu peneliti fokuskan rumusan masalah penelitian pada 3 tahapan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Fokus penelitian ini yaitu; (1) bagaimana perumusan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung ?; (2) bagaimana kesesuaian implementasi penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung ?; (3) bagaimana efektifitas penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung?.



## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Kebijakan Pendidikan**

Hakikat kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan pengembangan pendidikan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional. Kebijakan pendidikan perlu memperhatikan aturan-aturan kebijakan yang akan dilaksanakan. Baik dasar kebijakan, pelaksanaannya maupun penilaian hasil kebijaksanaan. Dasar acuan kebijakan sangat menentukan, hal ini terkait kelegalan kebijakan sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat.

Memahami Kebijakan Pendidikan maka harus memahami 3 dasarnya. Pertama, dengan merumuskan kebijakan Pendidikan. Pada hakikatnya merencanakan kebijakan merupakan tahap terpenting dalam proses kebijakan (Anggara, 2014). Tahapan-tahapan perencanaan Kebijakan Pendidikan, sebagai berikut; (1) menyimpulkan masalah beserta tujuan kebijakan dengan cara memprioritaskan masalah utama kemudian menentukan tujuan adanya kebijakan yang dipilih; (2) menyusun rencana kebijakan dengan cara memprioritaskan masalah utama kemudian menata agenda kebijakan, berdasarkan: lingkungan politik, trending topik, aksi demo dan permasalahan antar kelompok (Andeson, 1996); (3) mencari Alternatif kebijakan, yaitu melalui alternatif solusi melalui kritik dan saran dari dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan. (Anggara, 2014); (4) pengesahan kebijakan dengan cara mensosialisasikan kebijakan kepada sasaran kebijakan melalui ajakan dan menyesuaikan tujuan. (Anderson, 1996).

Kedua, mengimplementasikan kebijakan Pendidikan. Sangatlah penting analisis variabel-variabel implementasi kebijakan sebelum dilaksanakan. Ada 5 kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan yang dirangkum dari variabel-variabel model implementasi Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2014), yaitu: (1) tujuan kebijakan jelas dan konsisten. Tujuan yang ingin dicapai tidak menimbulkan tafsir ganda. Serta, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai (PERTAHANAN, Buku Saku Kader Bela Negara, 2018); (2) pemilihan tim pelaksana yang tepat. Tim pelaksana yang mengerti cara membina dan memberdayakan pendidikan Bela Negara baik oleh Kaban Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota (PERTAHANAN, Buku Saku Kader Bela Negara, 2018); (3) keselarasan persepsi

tujuan kebijakan antar tim pelaksana; (4) komitmen tim pelaksana; (5) dukungan dari pihak luar. Bagaimana keikutsertaan elemen pemerintah, dunia pendidikan, elemen dunia usaha, komponen masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dan media dalam mengawasi dan menilai kebijakan harus selalu diperhatikan. Contoh Media berperan pada mensosialisasikan dampak positif Bela Negara kepada masyarakat (PERTAHANAN, Buku Saku Kader Bela Negara, 2018). Selanjutnya dengan kriteria tersebut, barulah melakukan proses implementasi kebijakan. Adapun tahapan proses implementasi sebagai berikut: (1) output kebijaksanaan badan-badan pelaksana; (2) kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijaksanaan; (3) dampak nyata output kebijakan; (3) perbaikan mendasar peraturan kebijakan (Anggara, 2014).

Ketiga, mengevaluasi kebijakan Pendidikan. Efektif tidaknya sebuah kebijakan dinilai. Penilaian bermaksud untuk mengetahui : (1) ketercapaian tujuan penguatan pendidikan karakter Bela Negara; (2) mengoreksi dampak penguatan pendidikan karakter Bela Negara; (3) mengevaluasi keseluruhan kajian penguatan pendidikan karakter Bela Negara (Anggara, 2014). Sebagaimana tujuan evaluasi kebijakan untuk mengetahui variasi dalam indikator kinerja, contoh pertanyaan sebagai berikut: (1) sejauh mana kesesuaian capaian kebijakan (output dan outcomes) yang dihasilkan dari proses implementasi dengan indikator yang telah ditetapkan; 2) apakah hasil yang diinginkan telah tercapai; (3) seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (4) bagaimana strategi untuk lebih meningkatkan kinerja implementasi kebijakan tersebut.

## **2.2 Penguatan Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter terdiri dari dua suku kata yakni, pendidikan dan karakter. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik, sedangkan karakter sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain (KBBI, 2016). Pendidikan karakter tidak bisa dilepaskan dengan budaya bangsa. pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah. Oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin

sekolah, melalui semua mata pelajaran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah (Kemendiknas, 2010).

Pengertian pendidikan karakter melalui beberapa ahli, merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh melalui tiga aspek dalam peserta didik, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. (Lickona, 1991). Usaha mendidik karakter pada peserta didik dimulai dari pengetahuan tentang kebaikan, kemudian memunculkan komitmen (niat) pada tiap siswa terhadap kebaikan dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan tersebut. Tidak hanya itu saja, pendidikan karakter merupakan proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi karakter tersebut menjadi suatu proses berkelanjutan. (Sahlan & Prasetyo, 2012). Sedangkan penguatan pendidikan karakter merupakan pendidikan yang memperkuat karakter siswa melalui olah hati, pikir, rasa dan karsa dengan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat (inpres no 7 tahun 2018). Dari berbagai pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan usaha memperkuat penanaman karakter melalui pembelajaran baik secara pengetahuan, pendalaman maksud dan tujuan serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik.

### **2.2.1 Prinsip Pendidikan Karakter**

Secara ringkas prinsip-prinsip yang dapat menentukan kesuksesan pendidikan karakter sebagai berikut. Pendidikan karakter harus mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk ”good character”, karakter yang baik. Ada beberapa dasar mendidik karakter secara efektif (Lickona, 1991): Membangun pondasi karakter melalui etika inti dan pendukung, mendeskripsikan karakter dari segi perasaan, perilaku dan pikiran, lakukan pendekatan yang ekstensif, sahaja serta sungguh-sungguh, buatlah grup pembelajaran dengan banyak kepedulian, memberikan kesempatan siswa untuk bertindak secara moral, merancang kurikulum pembelajaran yang berarti melalui pengembangan karakter agar siswa berhasil tanpa menghilangkan rasa hormat kepada guru dan sesama, meningkatkan motivasi diri siswa, mengikutsertakan seluruh warga sekolah dalam pembelajaran, meningkatkan karakter sebagai pemimpin dalam diri siswa, ajak

lingkungan sekitar baik keluarga maupun masyarakat dan menilai karakter seluruh warga sekolah.

Pengembangan pendidikan karakter pada prinsipnya juga terintegrasi pada mata pelajaran. Prinsip pembelajaran budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Berikut prinsip-prinsip pengembangan pendidikan karakter bangsa oleh yaitu: (1) berkelanjutan; (2) melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah; (3) nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; (4) proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan (Kemendiknas, 2010).

Selain itu kemendikbud baru-baru ini juga memaparkan 5 nilai karakter utama dalam penguatan pendidikan karakter. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Lima nilai karakter utama tersebut bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK, yaitu: (1) religius; (2) nasionalisme; (3) integritas; (4) kemandirian; (5) kegotongroyongan. (Kemendikbud, 2017).

Kemudian dari 5 karakter utama tersebut dijabarkan menjadi 18 karakter, religius, toleransi, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, Gemar membaca, Peduli sosial, Jujur, Disiplin, Kreatif, Demokratis, Semangat kebangsaan, Menghargai prestasi, Cinta damai, Peduli lingkungan, Tanggung jawab (Kemendikbud, 2017).

### **2.3 Pendidikan Bela Negara**

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat 3). Hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah mewujudkan usaha tersebut dalam Aksi Nasional Bela Negara. Aksi Nasional Bela Negara itu sendiri merupakan sinergi masyarakat, bangsa dan negara untuk mengatasi segala ancaman yang menggagu keutuhan NKRI (PERTAHANAN, Buku Saku Kader Bela Negara, 2018). Sedangkan Bela Negara itu sendiri merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh

kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara ( pasal 9 ayat 1 huruf a undang undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ).

Pendidikan Bela Negara mempunyai tujuan agar semua warga Indonesia cinta dan mampu menjaga negara melalui pembinaan Bela Negara. Setiap warga harus sadar dan mengerti tanggung jawabnya, melalui misi Bela Negara. Mewujudkan WNI yang mempunyai sikap mental dan karakter Bela Negara. Membangun watak setiap WNI, agar memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara, baik secara psikis maupun fisik. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, antar lembaga pemerintah dan non pemerintah melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, baik di pusat maupun di daerah.

Demi tercapainya tujuan tersebut penanaman Nilai Bela Negara. Perlu adanya landasan dasar yang harus dipahami. Landasan terciptanya Bela Negara sebagai Aksi Nasional sebagai berikut:

- 1) UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) tentang hak dan kewajiban warga negara untuk membela tanah air.
- 2) UUD Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tentang dukungan warga negara sebagai kekuatan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) UU Hak Asasi Manusia RI nomor 39 tahun 1999 Pasal 68 mengenai upaya pembelaan negara oleh setiap warga negara.
- 4) UU RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang pemberdayaan seluruh warga sebagai pertahanan negara setiap saat.
- 5) UU RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- 6) Inpres no 7 tahun 2018 tentang Aksi Nasional Bela Negara.

### **2.3.1 Indikator Penerapan Nilai-nilai Bela Negara**

Pembinaan Bela Negara ialah Pendidikan Karakter untuk menjadi Kader Bela Negara. Kader Bela Negara adalah warga negara Indonesia yang sadar akan hak serta kewajibannya yang paling mendasar yaitu melakukan pembelaan negara, dimana kader Bela Negara telah mengikuti kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan telah memahami dan siap untuk mengamalkan nilai-nilai Bela Negara di lingkungannya sesuai dengan profesi masing-masing (Inpres No 7 tahun 2018). Esensinya bersikap dan berbuat terbaik bagi Bangsa dan Negara. Pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui pencapaian nilai-nilai karakter Bela Negara yang meliputi: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, memiliki kemampuan awal secara psikis dan fisik untuk Bela Negara (KEMENPOLHUKAM, 2016). Namun, karakter dapat dikembangkan dan bukan diturunkan secara genetik (Sahlan & Prasetyo, 2012). Karakter tersebut perlu ditanamkan melalui pendidikan formal, informal dan non formal. Maka dari itu kita perlu tahu, indikator sikap ketercapaiannya penanaman Bela Negara itu Sendiri.

Referensi kegiatan pendidikan Bela Negara yang bisa dilakukan di lingkungan pendidikan antara lain berbagai macam terbagi dalam 4 kategori. Pertama, kegiatan di dalam kurikulum, yang dilakukan dengan berbagai metode, seperti ceramah, Workshop, diskusi, demonstrasi, studi kasus, bermain sambil belajar dan sebagainya. Kedua, kegiatan di luar kurikulum, seperti palang merah remaja, pencinta alam pramuka, karawitan dan sebagainya. Ketiga, kegiatan mengabdikan kepada masyarakat / kemasyarakatan, seperti kerja bakti kebersihan lingkungan. Keempat, kegiatan menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif, seperti membangun lapangan tempat ibadah, olah raga, berdoa sebelum dan setelah belajar, bimbingan konseling dan sebagainya. Contoh Pengembangan salah satu nilai Bela Negara tersebut, memilih salah satu nilai dasar Bela Negara. Misal nilai “yakin pada Pancasila sebagai ideologi Negara”. Dari ideologi Pancasila diambil Sila Pertama Pancasila sebagai nilai inti, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.



## **Metode Penelitian**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini cocok, dengan pertimbangan masalah penelitian belum terperinci secara jelas (Sugiyono, 2015). Masalah pengambilan kebijakan sekolah tidak serta merta dapat diketahui dari satu hal saja, tapi oleh beberapa hal secara gejala sosial. Cara tersebut akhirnya efektif untuk memahami interaksi sosial di lingkungan Pendidikan (Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo, 2009). Beberapa cara yang biasa digunakan dengan triangulasi untuk memastikan kebenaran data.

### **3.2 Tempat Penelitian**

Sebagaimana judul yang diteliti, penelitian analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara. Peneliti memilih tempat penelitian di SMK Sore Tulungagung, mengingat sekolah inilah yang sudah menerapkan Bela Negara dan baru tahun ini angkatan siswa yang diberangkatkan ke BRIGIF 16 sudah lulus. Walaupun pada pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan di BRIGIF 16, peneliti tetap melakukan penelitian di SMK Sore Tulungagung. Alasannya, peneliti ingin mencari data analisa pendidikan tersebut dari pihak pembuat kebijakan. Hal ini mengutamakan bahwa pembuat kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara adalah pihak SMK Sore Tulungagung.

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Alat instrumen penelitian ini merupakan peneliti sendiri (Usman, 2003). Namun, peneliti tetap mengacu dasar dan kriteria sebuah kebijakan Bela Negara yang baik. Peneliti memilah pertanyaan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Berbagai pertanyaan sebagai acuan wawancara di lapangan, peneliti pilah menjadi 3 kelompok, perencanaan, implelementasi dan evaluasi kegiatan Bela Negara.

### **3.4 Sumber Data**

Adapun proses pengambilan informan sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara (Arikunto, 2006). Baik

secara observasi, wawancara dan data. Agar sumber data dapat dituju dengan jelas peneliti mengacu konteks bahasan kebijakan Pendidikan. Tertuju pada pihak yang merancang, melaksanakan serta menilai kebijakan serta yang terdampak kebijakan (Mulyadi, 2009).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam analisi penelitian ini menggunakan teknik observasi terlebih dahulu mencari sumber isu dari luar dahulu, kemudian melakukan wawancara kepada responden dan mendokumentasi hasil yang didapatkan. Seperti halnya teknik *snowball* dan *purposive* peneliti mencanangkan berbagai tingkatan responden yang dirasa dapat memberikan data secara luas, jika belum maka wawancara ke responden lainnya hingga dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Aktivitas dalam analisis data mengikuti *flow model* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015), yaitu data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*. Langkah-langkah analisis data ini meliputi periode pengumpulan data, pengelompokkan dalam display data agar terbentuk satu kesatuan kesimpulan jawaban. Selanjutnya data direduksi untuk dianalisis dengan *Grand theory*.

### **3.7 Uji Keabsahan Data**

Berdasarkan gambar diatas tersebut peneliti melakukan pengumpulan data melalui kegiatan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data. Selanjutnya pengolahan tingkat keabsahan data lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Pada pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif, peneliti menggunakan Teknik Uji kredibilitas melalui pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu serta transferabilitas (keteralihan) pengumpulan kejadian/data empiris yang dapat diambil kesamaan konteksnya dan dapat

dipertanggungjawabkan melalui laporan rinci dengan teknik triangulasi. Kemudian mengaudit keseluruhan aktifitas dalam melakukan penelitian. Terakhir uji *konfirmabilitas* (kepastian), jika hasil penelitian disepakati oleh banyak .

Sebelum masing-masing teknik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu ikhtisarnya dikemukakan. Ikhtisar tersebut terdiri dari kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik tertentu. Pada tahap Analisis Kepercayaan kegiatan yang dilakukan yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti akan menggunakan teknik, triangulasi yang terdiri dari observasi pasif, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Menggunakan buku catatan dan camera penulis menganalisis data menggunakan pedoman triangulasi (wawancara mendalam). Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, proposal pengajuan kegiatan Penguatan pendidikan karakter Bela Negara beserta laporan pertanggung jawaban (Sugiyono, 2015). Data dari hasil wawancara (terlampir) kepada narasumber 1 maupun narasumber 2 kebijakan , kemudian di perinci dengan acuan data perumusan penanaman nilai-nilai dasar Bela Negara, agar data dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca (Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo, 2009).

Kedua tahap kebergantungan, aktifitas peneliti akan diaudit oleh pembimbing. Maka dari itu peneliti harus mempunyai data jejak penelitian dan melaporkannya. Terakhir tahap kepastian, peneliti harus harus mengungkapkan temuan-temuan yang diperoleh kepada pembaca agar ia dapat memahami.

#### 4. Hasil Penelitian

SMK SORE Tulungagung merupakan Sekolah Teknologi Menengah swasta yang bernaung dibawah Yayasan Islam “Sunan Rahmat” dengan Ketua yayasan yang pertama adalah K.H. Arief Mustaqim, dimana saat itu beliau masih menjabat sebagai Dosen di kampus IAIN Tulungagung. Perkembangannya STM “SORE” Tulungagung menempati lokasi baru di Jl. Mastrip No. 100 Tulungagung melalui swadaya masyarakat mulai tahun 1989.

Salah satu visi SMK Sore melaksanakan pembinaan kesiswaan yang berbudi pekerti luhur, berkarakter serta berakhlakul karimah. Maka dari itu timbullah misi menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang Produktif, Adaptif, kreatif, berbudi pekerti luhur/berakhlak mulia. Sekolah dengan ini membuat kebijakan kerja baru, yaitu kebijakan penguatan pendidikan karakter pendidikan karakter bangsa dan Bela Negara (Penguatan pendidikan karakter PKBBN) bagi seluruh peserta didik baru yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini dapat dipandang sebagai langkah optimalisasi dari bentuk penerapan pendidikan karakter bangsa terintegrasi (pendidikan berbasis karakter). Kebijakan penguatan pendidikan karakter tersebut dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan dan permainan selama 3 hari, dilaksanakan secara professional melalui kerjasama antara SMK SORE Boyolangu dengan BRIGIF 16 WIRAYUDHA. Kegiatan penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan di BRIGIF 16 WIRAYUDHA tersebut merupakan upaya SMK SORE Boyolangu dalam memberikan pengalaman belajar bermakna kepada siswa, dalam lingkungan batalyon situasi lingkungan pembelajaran secara nyata dan kondusif. Harapannya dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan output yang memiliki kompetensi *softskill* dan *hardskill* berimbang, sehingga siap berkompetisi di era global.

Berdasarkan kebijakan tersebut, diperoleh yakni pertama, perumusan kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara dengan dasar kebijakan Bela Negara di SMK Sore Tulungagung. Kedua, kesesuaian implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung dengan Nilai-nilai Dasar Bela Negara. Ketiga, efektifitas pendidikan karakter

Bela Negara pada kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung, sebagai berikut:

#### **4.1 Perumusan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung**

Berdasarkan perencanaan kebijakan yang dipakai winarno, islammy dan anggara melalui 4 alur perencanaan kebijakan. 4 hal yang harus diperhatikan pada kebijakan tersebut meliputi, pencarian masalah dan memutuskan tujuan kebijakan, menyusun rencana kegiatan, merumuskan usulan kebijakan dan mengesahkan program kebijakan (Winarno, Islamy dan Anggara, 2014). Berikut perencanaan kebijakan Bela Negara di SMK Sore Tulungagung.

- a. Menyimpulkan masalah dan tujuan penguatan pendidikan karakter Bela Negara.

Berhasil tidaknya sebuah pengambilan kebijakan dapat diketahui dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik diawali dari pencarian masalah yang mendasari adanya kebijakan itu dikeluarkan. Sehingga memunculkan sebuah tujuan adanya kebijakan . SMK Sore sebagai sekolah yang baru 3 tahun ini melakukan kebijakan baru yaitu Bela Negara. Mempunyai latar belakang sendiri dalam membuat kebijakan baru Bela Negara bagi siswa siswinya. Hal ini disampaikan oleh narasumber 1, bahwa:

“latar belakang penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore untuk mewujudkan tujuan Nasional Pendidikan mengenai pengembangan watak dan peradaban bangsa, dengan menyiapkan siswa berkarakter disiplin Bela Negara untuk mampu bersaing di dunia kerja yang terus berubah dan penuh persaingan, ekspansi budaya, teknologi dari luar negeri, serta kehidupan masyarakat yang semakin kompleks” (W/KT/P1.2/6 Februari 2019).

Sedangkan, tujuan dengan adanya penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung. Dipertegas, seperti berikut:

Pertama, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai – nilai universal dan budaya bangsa dan religius. Kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Ketiga mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri , kreatif, berwawasan kebangsaan. Keempat membekali peserta didik dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta

dalam usaha pembelaan negara. Kelima menanamkan nilai – nilai perjuangan dan keprajuritan kepada generasi penerus bangsa pada umumnya, kepada generasi akademisi pada khususnya demi kelanjutan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan . Keenam membentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap, mental, pengetahuan dan keterampilan manajemen, kemampuan fisik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ketujuh terbentuknya sikap dan perilaku kebangsaan peserta didik, kognisi dengan pemberian pengetahuan tentang proxy war, afeksi dengan pemberian penghayatan melalui simulasi, audio visual, observasi, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap kondisi bangsanya, psikomotor dengan pemberian pengalaman berupa praktek sehingga mereka siap untuk bertindak” (D/KT/P2/6 Februari 2019).

b. Menyusun rencana penguatan pendidikan karakter Bela Negara.

Tantangan SMK Sore dalam mengembangkan pendidikan adalah acuan perundangan yang dijadikan dasar kebijakan. Acuan ini harus jelas dan sesuai konteks kebijakan yang diambil dengan kebijaksanaan sebelumnya. Adapun formulasi kebijakan Bela Negara di SMK Sore Tulungagung melalui narasumber 2, menyatakan bahwa:

“UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 mengenai peraturan Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 mengenai penguatan pendidikan karakter dan surat tugas Bapak Kepala SMK Sore Tulungagung tentang tim penguatan pendidikan karakter untuk siswa SMK Sore Tulungagung akhir semester gasal” (D/KT/P3/6 Februari 2019).

Jika mengacu pada cara memprioritaskan sebuah masalah (Andeson, 1996) yaitu memprioritaskan masalah utama kemudian menata agenda kebijakan, berdasarkan: lingkungan politik, trending topik, aksi demo dan permasalahan antar kelompok (Andeson, 1996). Maka dengan ini, acuan perundangan pada kebijakan ini dirasa kurang. Acuan perundangan hanya bersifat umum, sebagai tugas sekolah dalam menyiapkan karakter peserta didik. Hal ini belum cukup jika dihadapkan persepsi masyarakat tentang kebijakan baru ini. Penguatan pendidikan karakter Bela Negara itu seperti apa. Kekurangan acuan perundangan ini memungkinkan sekolah kurang dalam memahami tujuan Aksi Nasional yang mendasari Bela Negara di lingkungan pendidikan.

c. Mencari alternatif kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara.

Sebuah kebijakan pada saat perencanaan pasti memiliki sebuah kendala. Tak lain halnya kebijakan Bela Negara di SMK Sore. Sebuah kendala harus cepat



diatasi sebaik mungkin sebelum kebijakan tersebut disahkan. Kendala bahwa Bela Negara hanya dilaksanakan di BRIGIF 16, lalu bagaimana penguatan pendidikan karakter itu dapat terbentuk. Solusi yang dikeluarkan pihak sekolah, menyatakan bahwa:

“Penguatan pendidikan karakter Bela Negara itu sendiri dari BRIGIF 16. Sedangkan, pendidikan Kedisiplinan Bela Negara lanjutan dari Tim dari Kesiswaan, kedisiplinan dan tim ekstrakurikuler yang saling kesinambungan. Dengan peserta penguatan pendidikan karakter terdiri dari siswa siswi baru (kelas X) dari gugus 1 s.d. gugus 21 dan siswa kelas XI dan XII yang tidak mengikuti kegiatan Penguatan pendidikan karakter Bela Negara di BRIGIF 16 Wirayudha Kediri, tidak masuk tanpa keterangan diatas 5 dalam satu semester, kurang sopan kepada Guru dan siswa yang terekam kurang disiplin di piket, selanjutnya akan mengikuti penguatan pendidikan karakter Bela Negara lanjutan” (W/KT/P5.2/6 Februari 2019).

narasumber 1 pun juga menambahkan alasan pendidikan karakter Bela Negara direncanakan dilaksanakan di luar sekolah.

“Agar siswa mengenal lingkungan luar, baik siang maupun malam sebagai contoh dunia militer. Luas BRIGIF 16 yang memadai. Outbond yang memerlukan tempat luas untuk aktivitas kegiatan cinta tanah air. Karena kegiatan penguatan pendidikan karakter Bela Negara ini model semi militer, 50 % disesuaikan untuk pelajar dan sisanya disesuaikan untuk militer” (W/WK/P6/4 Februari 2019).

d. Pengesahan kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara.

Kebijakan yang sudah direncanakan dengan matang, tahap selanjutnya adalah pengesahan. Tanpa adanya dukungan baik dari orang tua murid maupun komite, rencana baguspun tidak akan terlaksana. Langkah Kepala Sekolah dalam pengesahan kebijakan Bela Negara melalui dukungan dari Orang tua murid maupun komite sekolah. Hasil wawancara menemukan sebagai berikut:

“langkah Kepala Sekolah dalam mendapatkan dukungan dari orang tua murid maupun komite sekolah, melalui: (1) pendaftaran awal masuk sebelum siswa mendaftar; (2) surat edaran bagi siswa yang sudah masuk; (3) sosialisasi pembiayaan anggaran penguatan pendidikan karakter Bela Negara. Biaya per siswa kurang lebih 380 ribu rupiah dengan subsidi dari sekolah berkisar 260 ribu rupiah” ( W/WK/P4/4 Februari 2019).

Melalui sosialisasi diawal pendaftaran memberikan gambaran kepada orang tua murid akan adanya kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara. Siswa yang ingin sekolah di SMK Sore harus mengikuti penguatan pendidikan karakter

tersebut. Sehingga itu merupakan pilihan mutlak dan masyarakat yang telah mendaftarkan anaknya, berarti siap menerima kebijakan tersebut. Selanjutnya bagi yang merasa keberatan dengan biaya dari kebijakan tersebut, dimusyawarahkan melalui pertemuan wali murid.

#### **4.2 Kesesuaian implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung**

Ada 5 kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan yang dirangkum dari variabel-variabel model implementasi Mazmania dan Sabatier (Anggara, 2014). Melalui 5 kriteria tersebut dapat digunakan sebagai umpan untuk mengetahui implementasi kebijakan Bela Negara di SMK Sore. Kriteria implementasi berkaitan dengan konsistensi tujuan kebijakan, pemilihan tim pelaksana, keselarasan persepsi tujuan antar tim, komitmen mereka, serta dukungan dari pihak luar. Sebagai berikut hasil yang didapat dari implementasi kegiatan Bela Negara di SMK Sore Tulungagung.

##### **a. Kejelasan dan konsistensi Tujuan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara**

Setiap kebijakan akan dilaksanakan oleh semua orang dalam lingkup kebijakn tersebut. Agar sebuah kebijakan sukses perlu kejelasan tujuan dan konsistensi dari pihak penyelenggara. Sebagaimana konsistensi ini juga dilakukan di SMk Sore. Langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah agar tujuan kebijakan jelas dan selalu konsisten melalui sebagai berikut:

“Nah kebijakan peraturan ini mengikuti sana, disesuaikan dengan sana. Jadi kita pesan peraturan kedisiplinan ini agak ketat seperti itu. Contoh : dalam penguatan pendidikan karakter ada pendidikan PROXY WAR. Pada proxy war ini anak-anak medapatkan langsung materi dari kapten berupa ke Indonesia, wawasan lebangsaan, pengenalan infantery dan tugas militer. Bagaimana generasi dirusak, sehingga yang menjaga negara tidak hanya TNI, tapi juga penerus bangsa” ( W/WK/I 3.1/4 Februari 2019).

Jika analisis didasarkan pada pembentukan kader Bela Negara melalui pembinaan setiap Kementerian/Lembaga maupun di luar lingkungan terhadap SDM di lingkungan masing-masing. Baik didalamnya, yakni : Pangdam, Danlantamal, Danlanud, Danrem, Dandim, Danramil, Danposal, Danyon. Brigif

16 di bawah naungan kementerian pertahanan juga mengetahui isi tujuan Aksi Nasional Bela Negara. Namun konsistensi tujuan saat pelaksanaan, sekolah perlu memberikan gambaran jelas kepada BRIGIF. Sehingga tujuan penanaman karakter Bela Negara yang nanti di lingkungan BRIGIF 16 tanpa menghilangkan pendidikan karakter melalui kegiatan yang menyenangkan (Lickona, 1991). Maka dengan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara jelas dan konsisten di SMK Sore sesuai.

b. Pemilihan tim pelaksana yang tepat

Kebijakan yang bagus juga harus diimbangi oleh tim yang bagus pula. Kebijakan Bela Negara yang masih baru dan sangat bagus diterapkan untuk generasi bangsa, memerlukan pemilihan tim pelaksana yang dapat bertanggung jawab. Peneliti mengajukan sebuah pertanyaan kepada narasumber 1 mengapa pihak sekolah memilih BRIGIF 16 WIRAYUDHA sebagai tempat pelatihan penguatan pendidikan karakter Bela Negara. Narasumber 1 mengatakan bahwa

“Ternyata BRIGIF lahannya paling luas daripada yonif, yakni terdiri dari 3 bataliyon, sehingga dirasa cukup untuk kegiatan Bela Negara untuk siswa SMK Sore yang kurang lebih berjumlah 1000 siswa” (W/WK/I 1/4 Februari 2019).

Alasan sekolah kurang tepat, namun pada pemilihan pada BRIGIF 16 sebagai pembina penguatan pendidikan karakter Bela Negara sudah dapat dikatakan sesuai dengan standar pelaksana pembinaan Bela Negara. Namun mengambil dari pernyataan sebelumnya, bahwa:

“Penguatan pendidikan karakter Bela Negara itu sendiri dari BRIGIF 16. Sedangkan, pendidikan Kedisiplinan Bela Negara lanjutan dari Tim dari Kesiswaan, kedisiplinan dan tim ekstrakurikuler yang saling kesinambungan” (W/WK/I 2/4 Februari 2019).

Sehingga koordinasi keduanya dapat membantu suksesnya kebijakan ini.

c. Keselarasan persepsi tujuan kebijakan antar tim pelaksana.

Baik tim pelaksana dan sekolah sebagai pengambil kebijakan harus saling kerjasama. Kerjasama dalam hal ini yang paling mendasar adalah menyamakan persepsi tujuan. Bahwa Bela Negara merupakan penjabaran penguatan pendidikan karakter. Menurut narasumber 2 langkah sekolah menjalin kerjasama tidak hanya pada satu kegiatan. Beliau menuturkan bahwa kerjasama mereka

“Selalu berhubungan dan saling mengingatkan kalau di SMK ada masalah, kedisiplinan ini sudah dilakukan apa belum khususnya dalam berbagai acara kegiatan sekolah”. (W/WK/I 2/4 Februari 2019).

Keterpaduan antar pelaksana kebijakan tidak hanya berakhir ketika kebijakan itu selesai. Mengingat pendidikan karakter dilakukan secara berkelanjutan (Kemendiknas, 2010). Maka perlu keterkaitan keduanya untuk mengarahkan ketercapaiannya sebuah kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterpaduan antara SMK Sore dan BRIGIF 16 dinyatakan cukup.

d. Komitmen tim pelaksana

Komitmen tim pelaksana harus juga diukur dan dilihat. Komitmen ini dapat diketahui dari serangkaian kegiatan yang diambil dengan kesesuaian nilai-nilai dasar Bela negara yang ditanamkan. Memang tidak dapat mengetahui secara langsung kegiatan yang dilaksanakan di BRIGIF 16. Namun melalui penjelasan yang disampaikan oleh narasumber 1 dan narasumber 2, menyatakan bahwa

“Namanya militer kepatuhan adalah harga mati, jadi tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan (W/WK/I 4.1/4 Februari 2019). Demi menjaga kerahasiaan kebijakan latihan di kawasan militer foto pun tidak boleh diambil secara bebas, tidak boleh ada yang membawa Hp. Semua dilaksanakan dengan baik, bahkan fotopun difotokan oleh sana” (W/KT/I 4.2/6 Februari 2019).

Tidak diragukan lagi, bahwa BRIGIF 16 WIRAYUDHA patuh dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter Bela Negara. Kemudian narasumber 2 pun menambahkan contoh kegiatan yang dilaksanakan di BRIGIF 16.

“Pembersihan, rangkaian outbound, materi wasbang dan proxy war, sholat. Kemudian kegiatan senam pagi, sholat dhuhur, binsik siang, makan siang, mengisi kusiner, api unggun dan fun game dilakukan dengan disiplin waktu. Anak disuruh outbound malam dimasukkan ke dalam hutan sampai anak disuruh guling-guling” (W/KT/I 5.2/6 Februari 2019)

Kegiatan lain peneliti jabarkan, seperti halnya wasbang atau dikenal wawasan kebangsaan. Wasbang merupakan materi dalam penguatan pendidikan karakter untuk menunjukkan kepada siswa tentang kesadaran berbangsa dan setanah air, maupun wawasan mengenai memperjuangkan persatuan bangsa.

Tidak hanya itu ada juga materi *proxy war*. *Proxy war* merupakan materi dilat yang memunculkan bagaimana sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh siswa untuk menangkal ancaman dari luar. Sehingga persatuan dan kesatuan NKRI akan selalu terjaga.

e. Dukungan dari pihak luar kebijakan.

Kebijakan tidak serta merta langsung dapat diterima, terlebih lagi ini merupakan kebijakan baru. Sekolah harus mampu menunjukkan keterbukaannya atas kebijakan yang diambil. Maka dari itu pihak SMK sore untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar menyampaikan hal berikut:

“Pihak luar masyarakat diperbolehkan untuk mengamati masuk langsung ke dalam lingkungan sekolah sebelum di kirim ke BRIGIF 16. Namun, setelah di lingkungan BRIGIF, untuk menjaga kerahasiaan keamanan negara maka hanya tim pelaksana yang di perbolehkan”(W/WK/I 6/4 Februari 2019).

Mengacu pada inpres no 7 tahun 2018 turut serta dalam aksi Bela Negara terdiri dari elemen pemerintah, dunia pendidikan, elemen dunia usaha, komponen masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media. Walaupun tertutupnya kegiatan Bela Negara di BRIGIF 16, dengan alasan menjaga kerahasiaan Negara. Tetap diperlukan transparasi kegiatan kepada elemen masyarakat. Melalui transparasi kegiatan penguatan pendidikan karakter, masyarakat akan tahu kejelasan gambaran kegiatan Bela Negara itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan jalannya kebijakan ini. Dengan demikian dapat dikatakan keikutsertaan dari pihak luar kurang.

#### **4.3 Efektifitas Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung**

Selesainya pelaksanaan penguatan pendidikan karakter Bela Negara belum dikatakan semua selesai. Perlu adanya evaluasi kebijakan tersebut guna untuk memberi keputusan lanjut tidaknya program dilanjutkan kembali. Evaluasi tidak hanya pada ketercapaian tujuan Bela Negara. Namun lebih dari itu berkaitan pada dampaknya, serta mengkaji keseluruhan proses kebijakan tersebut (Anggara, 2014). Sebagai berikut temuan hasil evaluasi penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore.

a. Ketercapaian Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara.

Ketercapaian penguatan pendidikan karakter Bela Negara sudah tercapai atau belum dapat ditinjau sejauh mana kesesuaian capaian kebijakan (output dan outcomes) yang dihasilkan dari proses implementasi dengan indikator yang telah ditetapkan. SMK Sore juga harus mempunyai gambaran. Dari data yang sudah direduksi baik dari narasumber 1 dan narasumber 2, menyatakan bahwa :

“Hasil penguatan pendidikan karakter Bela Negara sudah tercapai (W/WK/E 1.1/4 Februari 2019). Jika diambil persikap siswa sulit. Kalau dari outputnya, jika dibandingkan lulusan sekarang dengan lulusan belum adanya penguatan pendidikan karakter, berbeda jauh. Sebelumnya siswa dari kelas X ada 20 kelas sampai di kelas XII ada 17 kelas , sedangkan yang lulusan penguatan pendidikan karakter ini sampai lulus masih utuh 20 kelas. Selain itu penyerapan tenaga kerja lebih banyak anak-anak yang di brigifkan daripada belum, karena anak yang di terima di DU/DI bukan anak yang pandai tapi berkarakter baik” (W/KT/E 2.2/6 Februari 2019).

Berdasarkan data yang didapatkan, kemudian peneliti mencari jawaban dari guru BK. Adapun jumlah siswa jika dibandingkan dari sebelum dan sesudah penguatan pendidikan karakter mengalami peningkatan. Namun tujuan penguatan pendidikan karakter belum ditunjukkan melalui indikatornya. Sehingga sebagaimana capaian kebijakan penguatan pendidikan karakter hanya bersifat umum. Dengan demikian dapat peneiliti simpulkan evaluasi tujuan kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara masih kurang.

b. Dampak Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara.

Dampak besar dalam penguatan pendidikan karakter Bela Negara sangat banyak. Pihak sekolah tidak bisa menjawab secara terperinci. Namun satu hal yang dikatakan Narasumber 1 mengenai efektif tidaknya dan dampaknya, beliau menyampaikan bahwa:

“Sangat efektif, dilihat dari berkurangnya siswa yang melanggar peraturan sekolah” (W/WK/E 3.1/4 Februari 2019).

Dari dampak tersebut pihak sekolah membuat strategi untuk meningkatkan dampak kebijakan tersebut. melalui

“Kedisiplinan pendidikan karakter harus dilaksanakan setara berkelanjutan di sekolah. Guru harus memberikan contoh disiplin waktu juga, salah satunya adanya tugas piket guru dan staf. Ketertiban



kedisiplinan dapat dilihat dari buku pelanggaran, minimnya siswa yang terlambat. Jika ada siswa yang tidak ikut penguatan pendidikan karakter sebelumnya dan tercatat memiliki pelanggaran lebih, akan diikutkan dalam penguatan pendidikan karakter Bela Negara di tahun berikutnya” (W/WK/E 4.1/4 Februari 2019).

Namun yang didapatkan oleh peneliti dalam sidak buku catatan pelanggaran adalah pelanggaran tata tertib secara umum. Pelanggaran tersebut antara lain; terlambat datang, seragam tidak sesuai, bersepatu selain warna hitam, atribut tidak lengkap, kendaraan bermotor tidak standar, merokok dalam kondisi berseragam dan keluar lingkungan sekolah saat KBM tanpa ijin. Seharusnya untuk mengkaji lebih dalam lagi kajian evaluasi, pelanggaran pada penanaman karakter Bela Negara harus dikelompokkan. Sehingga evaluasi terhadap kebijakan ini akan lebih mudah. Dengan demikian pada dimensi kajian evaluasi kebijakan dinilai masih kurang.

c. Evaluasi Keseluruhan Kajian Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara.

Mengevaluasi keseluruhan kajian Bela Negara berarti menilai semua tahapan rangkaian kebijakan tersebut. Baik dari perencanaannya, implementasinya hingga dampaknya. Saat mengetahui secara langsung dan membandingkan dengan daftar pelanggaran, pelanggaran kedisiplinan di SMK Sore berkurang. Tindak lanjut yang dilakukan pihak sekolah dengan adanya dampak tersebut, seperti disampaikan narasumber 1 berikut:

“Selain itu untuk menjaga efektifitas tersebut mengingklutkan kedisiplinan BRIGIF 16 secara berkelanjutan diperaturan sekolah. Ketertiban kedisiplinan dapat dilihat dari buku pelanggaran, minimnya siswa yang terlambat. Serta dari sisi sopan santun, menghormati guru melalui 3S (senyum, salam dan sapa). Cukup sekali dalam mendisiplinkan siswa, dilihat dari presentase siswa yang masuk dan keluar dari angkatan sebelum ada kebijakan dan angkatan sesudah mengikuti kebijakan” (W/KT/E 1.2/6 Februari 2019).

Kemudian, peneliti mencari dari data pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran yang ada di buku catatan antara lain: terlambat datang, seragam tidak sesuai, bersepatu selain warna hitam, atribut tidak lengkap, kendaraan bermotor tidak standar, merokok dalam kondisi berseragam dan keluar lingkungan sekolah saat KBM tanpa ijin. Sehingga efektifitas Pendidikan Karakter Bela Negara pada

kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung belum begitu tercapai.

## **5. Pembahasan**

### **5.1 Perumusan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung**

Sekian banyak analisis kegiatan Bela Negara di SMK SORE, akhirnya menghasilkan pembahasan kebijakan baru, agar program Bela Negara dapat diterapkan di SMK dengan sesuai. Kebijakan pada kegiatan perencanaan Bela Negara di dunia pendidikan lingkup SMK, sebagai berikut:

Masalah dan tujuan kebijakan penguatan pendidikan karakter di SMK Sore yakni menyiapkan generasi Bangsa yang siap bersaing terhadap resiko dari luar Negara untuk menjaga keutuhan NKRI. Pihak sekolah perlu melakukan persiapan rencana kegiatan. Melalui cek list karakter dasar nilai-nilai Bela Negara untuk kalangan pelajar di lingkup sekolah. Merujuk tujuan Nasional Bela Negara, bahwa aksi Nasional Bela Negara memerlukan kerjasama sinergi masyarakat, Bangsa dan Negara untuk menangkai berbagai ancaman yang menggagu Negara Kesatuan Republik Indonesia (Inpres no 7, 2008). Maka dari itu tujuan dari kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore perlu di kelompokkan sesuai dengan nilai-nilai dasar Bela Negara (PERTAHANAN, Buku Saku Kader Bela Negara, 2018). Pengelompokan tujuan, yang termasuk nilai-nilai dasar Bela Negara sebagai berikut: (1) membekali peserta didik dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keprajuritan kepada generasi penerus bangsa pada umumnya, kepada generasi akademisi pada khususnya demi kelanjutan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan tujuan penanaman karakter cinta tanah air; (2) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa sesuai dengan tujuan penanaman karakter kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) keyakinan Pancasila sebagai ideologi Negara yakni mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan budaya bangsa dan religius sesuai dengan tujuan

penanaman karakter Keyakinan Pancasila sebagai ideologi Negara; (4) mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan sesuai dengan tujuan penanaman karakter Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara; (5) membentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap, mental, pengetahuan dan keterampilan manajemen, kemampuan fisik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Serta terbentuknya sikap dan perilaku kebangsaan peserta didik, kognisi dengan pemberian pengetahuan tentang *proxy war*. Afeksi dengan pemberian penghayatan melalui simulasi, audio visual, observasi, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap kondisi bangsanya. Psikomotor dengan pemberian pengalaman berupa praktek sehingga mereka siap untuk bertindak sesuai dengan tujuan penanaman karakter

Pada penyusunan rencana kebijakan Bela Negara di SMK Sore. Sangatlah penting pihak sekolah dalam mengetahui peristiwa diluar sekolah dan mengambil isu-isu politik di lingkungan sekitar guna menguatkan dasar kegiatan ini. Dasar kegiatan yang kuat akan memberikan banyak respon dan dukungan dari berbagai kalangan, baik dari orang tua murid, komite sekolah, LSM dan pihak BRIGIF 16. Oleh karena itu sekolah perlu menambahkan dasar perundangan kegiatan Bela Negara, antara lain: UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat (3), UUD Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2), Undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 Pasal 68, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 dan Inpres no 7 tahun 2018.

Kemudian dilanjutkan mencari alternatif kebijakan. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, SMK Sore memilih yakni BRIGIF 16 sebagai pembimbing di lapangan. Syarat keberhasilan kebijakan melalui pelaksana yang dikatakan mampu (Anggara, 2014). BRIGIF yang di bawah naungan Menteri Pertahanan sudah lebih dulu paham tentang kebijakan Aksi Nasional Bela Negara. Sehingga, mempermudah pemahaman kepada tim pelaksana penguatan pendidikan karakter Bela Negara itu sendiri. Tidak hanya itu pendidikan penguatan pendidikan karakter Bela Negara untuk menanamkan karakter Bela Negara secara 2 macam, baik di luar maupun secara lanjut di sekolah ini pun sejalan dengan prinsip pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Bahwa pendidikan karakter harus berkelanjutan, terintegrasi dan dikembangkan pada setiap mata pelajaran,

dilaksanakan secara aktif dan menyenangkan (Kemendiknas, 2010). Namun, pihak sekolah harus menambah referensi kegiatan Bela Negara. Referensi tersebut dapat berupa tata tertib, bahan ajar, diagram alur kegiatan, petunjuk administrasi, perlu diperhatikan juga narasumber dan satuan lembaga yang akan dilibatkan dan lain-lain. Dari segi bahan ajar, terdiri dari materi pokok, pendukung dan tambahan. Materi pokok antara lain: tataran dasar Bela Negara, wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar kebangsaan dan sistem pertahanan semesta. Materi pendukung berupa kepemimpinan, bahaya radikalisme serta narkoba, kerukunan umat beragama, penanggulangan bencana alam, pengetahuan lalu lintas, narkotika dan korupsi. Materi tambahan tentang organisasi, kegiatan pelayanan akademik, sistem pendidikan SMK. Contoh diagram alur kegiatan seperti pada (PERTAHANAN, Buku Saku Kader Bela Negara, 2018).

Lalu akhir perencanaan, syarat penerimaan kebijakan yaitu mensosialisasikan kebijakan kepada sasaran kebijakan melalui ajakan dan menyesuaikan tujuan (Anderson, 1996). langkah yang diambil Kepala sekolah dalam pengesahan kebijakan melalui rapat pendahuluan. Fokus rapat mengenai kesepakatan dan pengesahan kebijakan. Sebagai contoh, rancangan anggaran biaya kegiatan Bela Negara, serta jalinan MOU dengan orang tua/wali murid, sudah sesuai.

## **5.2 Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung**

Sekian banyak analisis kegiatan Bela Negara di SMK SORE, akhirnya menghasilkan pembahasan kebijakan baru, agar program Bela Negara dapat diterapkan di SMK dengan sesuai. Saran kebijakan pada kegiatan pelaksanaan Bela Negara di dunia pendidikan lingkup SMK. Melakukan kegiatan pembinaan pada kegiatan Bela Negara di SMK. Pembinaan diarahkan pada konsistensi pemahaman tujuan dan sasaran kebijakan. Bahwa penanaman karakter Bela Negara ditanamkan secara menyenangkan dengan menumbuhkan rasa bangga siswa terhadap dunia militer (Lickona, 1991). Maka tumbuhlah rasa ketertarikan untuk cinta tanah air dan menjaga negara seperti mereka tanpa adanya sebuah paksaan (Kemendiknas, 2010). Serta mengikutsertakan nilai-nilai Bela Negara dalam kegiatan tersebut tanpa terkecuali (KEMENPOLHUKAM, 2016).

Selanjutnya memilih dan memonitor tim pelaksana melalui SK penugasan yang telah ditetapkan. Tim intern terdiri dari waka kesiswaan beserta anggotanya dan tim bimbingan konseling serta eksternal termasuk pihak BRIGIF. Berikutnya membimbing dan mengasuh tim pelaksana dengan berpedoman pada program kerja, diagram alur kerja dan tugas serta tanggung jawab masing-masing (Anggara, 2014). Namun tidak hanya itu saja mengawasi dan mengendalikan tim pelaksana, lembaga terkait dan pemateri agar terwujud pencapaian tujuan Bela Negara melalui kesepakatan MOU. Terakhir sebisa mungkin melaksanakan dokumentasi dan peliputan setiap kegiatan baik intern maupun ekstern untuk transparansi kegiatan (PERTAHANAN, Tataran dasar Bela Negara, 2018). Hal ini sebagai bukti bahwa kegiatan kedepan dapat dijadikan arsip.

### **5.3 Efektifitas Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Bela Negara Di SMK Sore Tulungagung**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh. Banyak sekali langkah yang perlu ditambah oleh SMK Sore untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang diambil. Sejauh yang peneliti dapatkan. Pihak sekolah belum melakukan kajian secara mendalam. Sehingga pengukuran dampak kegiatan hanya berdasarkan perubahan sikap singkat. Pihak SMK Sore selanjutnya perlu mengupayakan hal berikut. Pada analisis ketercapaian tujuan, pihak sekolah perlu membuat laporan kegiatan Bela Negara di SMK sebagai pertanggung jawaban kegiatan. Sertakan juga cek list ketercapaian tujuan kebijakan Bela Negara (KEMENPOLHUKAM, 2016). Selanjutnya tim melakukan cek terhadap tujuan dan sasaran Bela Negara berdasarkan diagram alur kegiatan yang sudah dibuat. Jika masih ada masalah, tulis sebagai koreksi kebijakan berikutnya. Kemudian analisis dampak, dapat dilakukan dengan mengukur ketercapaian kegiatan secara jangka pendek maupun secara jangka panjang kegiatan Bela Negara (KEMENPOLHUKAM, 2016). Tanggapan peserta sangat diperlukan untuk mengambil langkah bagaimana harapan dari mereka secara langsung. Apa saja yang mereka rasakan dalam kegiatan tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Contoh tanggapan peserta setelah mengikuti kegiatan. Selanjutnya, mengkaji kebijakan Bela Negara melalui tanggapan peserta maupun semua warga sekolah (Anggara, 2014). Salah satu isi

angket tersebut untuk menggali seberapa besar pemahaman siswa mengenai ilmu yang sudah didapatkan. Seberapa besar penyerapan materi, apakah ada pengaruhnya tanggapan mereka saat pelaksanaan serta saran mereka untuk kesempurnaan program tersebut.

## **6. Penutup**

### **6.1 Kesimpulan**

Hasil dari analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara, disimpulkan dalam 3 ranah kebijakan.

1. Perumusan kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara dikatakan kurang baik, belum mengacu pada buku modul esensi Bela Negara. Kekurangan jelas nampak pada indikator yang diharapkan dari wujud nilai-nilai dasar Bela Negara yang belum tercantum pada proposal. Serta dasar perundangan yang digunakan hanya sebatas lingkup pengembangan sekolah maupun pembinaan karakter secara umum. Hasilnya pendidikan karakter Bela Negara ini seolah hanya berupa nama, bukan pembentukan kader Bela Negara untuk lingkup dunia pendidikan.
2. Kesesuaian implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung cukup bagus walaupun perencanaannya meluas. Pemilihan kerjasama dengan BRIGIF 16 sebagai pelaksana dilapangan sangat tepat. Namun, tetap perlu memperhatikan adanya kerjasama keduanya untuk menciptakan kegiatan pendidikan karakter sesuai tujuan penguatan karakter Bela Negara, yakni pihak BRIGIF, sekolah dan masyarakat.
3. Efektifitas Pendidikan Karakter Bela Negara pada kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung. Jika pada tahap evaluasi ini, peneliti menyimpulkan memang ada perubahan signifikan dari siswa untuk mematuhi peraturan secara signifikan dibandingkan dengan angkatan sebelumnya, yang tanpa adanya penguatan pendidikan karakter diawal masuk dulu.. Sehingga efektifitas Pendidikan Karakter Bela Negara pada kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara di SMK Sore Tulungagung belum begitu

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ditemukan ketidak sesuaian dalam kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara. Kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara perlu diperinci dan diperjelas, baik dari perencanaan hingga implementasinya. Hingga akhirnya kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang diinginkan apa belum. Apalagi kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara masih baru-baru ini dilakukan. Oleh karena itu, agar kebijakan penguatan pendidikan karakter Bela Negara yang diberikan lebih sinkron dan optimal. Maka, peneliti memberikan sebuah saran dari analisis yang dilakukan. Semoga dapat membantu memperbaiki kebijakan ini menjadi lebih baik. Saran yang saya sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Sekolah: memperjelas tujuan penguatan pendidikan karakter Bela Negara sebagaimana didalamnya terbentuk karakter dasar yang dicanangkan dalam Bela Negara. Melalui cek list sikap dasar serta indikator ketercapaian Bela Negara. Kemudian, memperkuat perundangan sebagai dasar kegiatan. Perundangan ini pada Bela Negara itu sendiri baik pada UUD 1945 maupun landasan kebijakan ini sebagai Aksi Nasional. Perlu juga perundangan dari kebijakan pemerintah sebelumnya, sehingga penguatan pendidikan karakter Bela Negara memiliki keselarasan dan implikasi dari kebijakan diatasnya.
2. Bagi pihak Pelaksana: pada implementasi kegiatan, perlu mensinkronkan persepsi penguatan pendidikan karakter Bela Negara antar lembaga, sekolah dan BRIGIF. Harapannya semua karakter dasar Bela Negara masuk dalam setiap kegiatan Bela Negara.
3. Bagi Guru : pendidikan Karakter harus didukung semua warga sekolah. Warga sekolah harus mengerti apa tujuan diadakannya penguatan pendidikan karakter Bela Negara itu sendiri. Kemudian secara sadar dengan tanggung jawabnya masing-masing memberikan contoh dan menerapkannya dalam keseharian disekolah. Demikian kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar terbentuklah budaya cinta tanah air sebagai wujud karakter Bela Negara. Serta mengevaluasi kebijakan Bela Negara baik *output* serta *income* yang diharapkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anderson. (1996). *Public Policy Making*. New York: Reinhart and wiston.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Pendidikan*. bandung: CV pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adzkia, A. (2015). *Menko Luhut: Bela Negara Akan Masuk Kurikulum SMA*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151015131421-20-85061/menko-luhut-bela-negara-akan-masuk-kurikulum-sma>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. (2016). Retrieved from  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Boyolangu, T. I. (2015). <http://www.smksore..sch.id/index.php?p=info&id=3>.  
Retrieved from <http://www.smksore.sch.id/index.php>.
- Darmawan, B. (2014). *Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Jurnal Pelopor Pendidikan*.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press.
- Harun, C. Z. (2015). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan Karakter. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hidayati. (2014). *Manajemen Pendidikan, Standar Pendidik Pendidik*. |Jurnal Al-Ta' L.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » RePendidikan Indonesia. (2016). *Target Kemendikbud Dalam Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017*.
- KBBI. (2016). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Retrieved from KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakter>
- Kemendiknas. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter*. In B. P. Pengembangan, *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Jakarta.
- Kemendiknas. (2010). *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. In B. P. Pengembangan, *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Jakarta.
- KEMENPOLHUKAM. (2016). *Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan dan Pesatuan Bangsa*. Jakarta.
- Lickona, t. (1991). *Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect*. In t. lickona. New York: Bantam Books.
- Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo, S. L. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.



- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) tentang kewajiban untuk membela negaranya*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *UUD Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tentang pertahanan dan keamanan negara*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 Pasal 68 tentang HAM*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2002). *UU No 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 huruf a tentang Pertahanan Negara*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang RePendidikan Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Inpres No 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara*. Jakarta: Deputi Bidang Poilitik Hukum dan Keamanan.
- Rachmah, H. (2013). Nilai Nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUN 1945. E-Journal WIDYA Non-Eksakta.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2005). Manajemen. In Management.
- Sahlan, A., & Prasetyo, A. T. (2012). *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian Kuantitatif, kualitaif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat, A. (2011). *Mengapa Pendidikan Karakter? Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Susanti, Martien Herna. (2017). *Bela Negara, Haruskah?*.  
<https://unnes.ac.id/pakar/bela-negara-haruskah/>
- Triwiyanto, T. (2013). *Pemetaan mutu manajemen berbasis sekolah melalui audit manajemen pendidikan*. Manajemen Pendidikan.
- Usman, H. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardi, R. (2016). *Bela Negara Disesuaikan Kurikulum 2013*.  
<https://www.beritasatu.com/pendidikan/338550-bela-negara-disesuaikan-kurikulum-2013.html>, diakses 19 desember 2018.

## Lampiran 1

### Indikator pencapaian sikap dari nilai-nilai dasar Bela Negara

No.	Nilai-nilai Dasar Bela Negara	Parameter perilaku siswa
1.	Cinta Tanah Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berpakaian rapi dan sopan</li><li>2. Menghormati bapak dan ibu guru</li><li>3. Menjaga dan memberishkan kebersihan lingkungan sekolah</li><li>4. Rajin belajar</li><li>5. Mengetahui dan memahami lagu-lagu kebangsaan maupun lagu-lagu daerah</li><li>6. Senantiasa ikut lomba-lomba antar sekolah</li><li>7. Ikut menyanyikan lagu-lagu wajib</li><li>8. Masuk sekolah dengan tepat waktu</li></ol>
2.	Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berpartisipasi pada tiap upacara</li><li>2. Berperilaku sopan dan santun</li><li>3. Mematuhi peraturan sekolah</li><li>4. Memakai bahasa indonesia yang baku di lingkungan sekolah</li><li>5. Berusaha menjadi panutan siswa yang baik untuk siswa lain</li><li>6. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam</li><li>7. Menjaga nama baik sekolah di manapun.</li></ol>
3.	Keyakinan Pancasila Sebagai ideologi Bangsa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tertib dalam beribadah di sekolah</li><li>2. Menjaga kerukunan antar agama</li><li>3. Berteman tanpa memandang bulu.</li><li>4. Menghormati pendapat orang lain</li><li>5. Menjaga kerukunan antar teman berbeda agama</li><li>6. Mengetahui isi dari Pancasila</li><li>7. Memahami Lambang dan Simbol-simbol negara</li></ol>
4.	Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sadar akan tanggungjawabnya membersihkan kelas.</li><li>2. Ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler</li><li>3. Ikut berpartisipasi memajukan sekolah</li></ol>
5.	Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dasar-dasar Pancasila di sekolah</li><li>2. Menjadi siswa pelopor siswa teladan berakhlak mulia.</li><li>3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.</li><li>4. Menjaga kesehatan dan rajin berolahraga</li></ol>

## Lampiran 2

Rangkaian kegiatan pada penguatan pendidikan karakter Bela Negara.



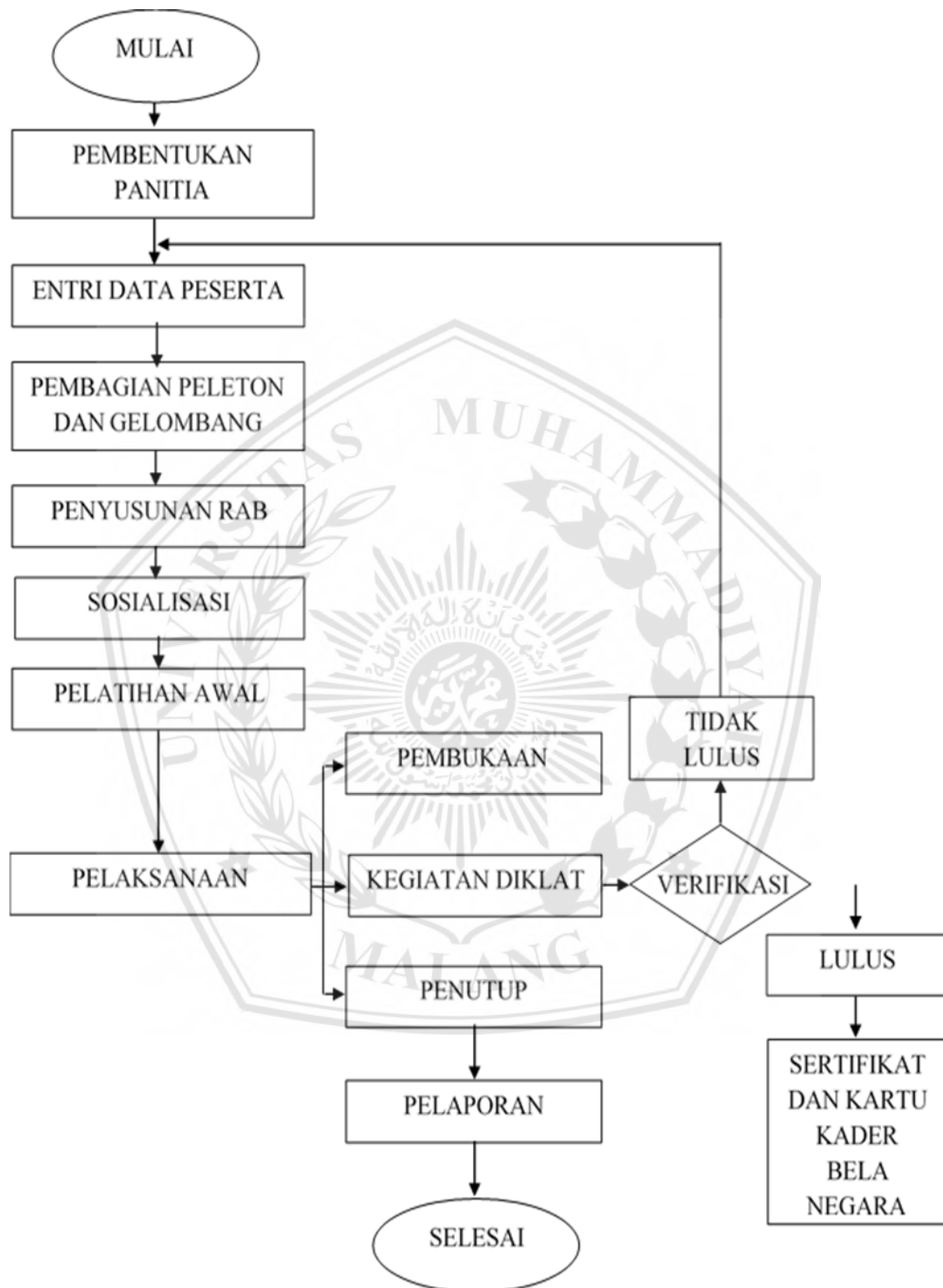
## Lampiran 2

Tabel 4.1: Cek list sikap dasar Karakter Bela Negara

No.	Sikap Karakter Dasar	Cek list		
		SP	B	K
1	Berpakaian rapi dan sopan		✓	
2	Menghormati bapak dan ibu guru			✓
3	Menjaga dan memberidikan kebersihan lingkungan sekolah		✓	
4	Rajin belajar		✓	
5	Mengucapkan dan menghormati lagu-lagu kebangsaan maupun lagu-lagu daerah			✓
6	Semua siswa ikut lomba-lomba antar sekolah		✓	
7	Ikut menyanyikan lagu-lagu wajib			✓
8	Masuk sekolah dengan tepat waktu		✓	
9	Berpartisipasi pada tiap upacara	✓		
10	Berperilaku sopan dan santun	✓		
11	Mematuhi peraturan sekolah		✓	
12	Memakai bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekolah		✓	
13	Berusaha menjadi pribadi siswa yang baik untuk siswa lain		✓	
14	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam		✓	
15	Menjaga nama baik sekolah di manapun	✓		
16	Teratih dalam beribadah di sekolah		✓	
17	Menjaga kerukunan antar agama		✓	
18	Beriman tanpa memusuhi bula		✓	
19	Menghormati pendapat orang lain		✓	
20	Menjaga kerukunan antar teman berbeda agama		✓	
21	Mengontrol diri dari pacaran			✓
22	Memahami Lambang dan simbol-simbol negara			✓
23	Sadar akan tanggungjawabnya membersihkan kelas			✓
24	Ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler			✓
25	Ikut berpartisipasi memajukan sekolah		✓	
26	Melaksanakan dasar-dasar Pancasila di sekolah		✓	
27	Menjadi siswa pelopor siswa teladan beribadah		✓	
28	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah			✓
29	Menjaga kesehatan dan rajin berolahraga	✓		

#### Lampiran 4

#### Bagan Alur Kegiatan Peserta Bela Negara





Lampiran 5

Tabel 4.2 : Pengukuran wawasan kebangsaan peserta

NO	URAIAN	NILAI
	<p><b>A. DETILSIK</b>            Baca di bawah ini dengan serti, jumlahlah setiap jawaban dengan aplikasi' sederhana, tidak terlalu, tidak terlalu-mudah dan terakur, serta dapat dipraktikkan/dilakukan' diimplementasikan saat melaksanakan tugas sebagai Peserta Didik sehingga dapat menginternalisasi setiap jawaban pertanyaan</p> <p>Dikumpulkan kepada Wali Kelas pada tanggal <u>6 Februari 2019</u></p> <p><b>B. JAWAB :</b></p> <p>a. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan YME atas nikmat, rahmat dan rejeki atau pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan YME kepada kita ?</p> <p>Jawab : <u>Sebab Tuhan YME telah memberi nikmat kepada kita, agar kita dapat bersyukur, mengimani, dan menjalankan perintah-Nya.</u></p> <p>b. Bagaimana cara Peserta Didik mengimani Tuhan yang telah memberi nikmat, rahmat, rejeki yang telah diberikan oleh Tuhan YME kepada Peserta Didik sesuai apa yang kita mengimani?</p> <p>Jawab : <u>Dengan bersyukur, mengimani, dan menjalankan perintah-Nya.</u></p>	
1	<p>Apakah yang Peserta Didik ketahui tentang Pengertian / Maksud Wawasan Kebangsaan = <b>PENBANGUNAN KARAKTER BANGSA</b> ?</p> <p>Jawab : <u>Sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang menunjukkan adanya rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.</u></p> <p>Apakah yang Peserta Didik ketahui tentang pengertian Wawasan Kebangsaan <b>"PENBANGUNAN KARAKTER BANGSA"</b> ?</p> <p>a. Pengertian Wawasan Kebangsaan</p> <p>Jawab : <u>Sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang menunjukkan adanya rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.</u></p> <p>b. Pembangunan Karakter Bangsa ?</p> <p>Jawab : <u>Sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang menunjukkan adanya rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.</u></p> <p>c. Pentingnya Pembangunan / Penguatan Karakter Bangsa ?</p> <p>Jawab : <u>Sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang menunjukkan adanya rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.</u></p> <p>d. Tujuan Pembangunan / Penguatan Karakter Bangsa ?</p> <p>Jawab : <u>Sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang menunjukkan adanya rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.</u></p> <p>Apakah yang Peserta Didik ketahui tentang "Konsep Pembangunan</p>	



Lampiran 6

**ANGKET**  
**PASCA KEGIATAN DIKLAT KARAKTER DAN BELA NEGARA**  
**DI BRIGIF 16 KEDIRI**

**PETUNJUK**

1. Angket ini apa adanya sesuai dengan yang Anda pikirkan atau rasakan setelah mengikuti kegiatan Bela Negara di BRIGIF 16 KEDIRI
2. Angket ini bersifat RAHASIA. Angket untuk kepentingan penelitian semata dan akan menjadi dasar pengendalian kebijakan di masa yang akan datang
3. Jawaban yang Anda berikan tidak berpengaruh terhadap nilai atau penilaian apapun
4. Jika ada ketidakhakikatan tertentu mengenai hal yang mengisi halaman mulai dari persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan, silakan dituliskan dihalah halaman ini.
5. Terima kasih atas kerja samanya
6. Apakah Anda sudah pernah mengisi angket ini sebelumnya? Belum

**PERTANYAAN**

1. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan di Klak Bela Negara di BRIGIF 16 KEDIRI tersebut?  
Angket yang sangat bagus sekali
2. Bagaimana kesiapan materi yang diberikan dengan kompetensi yang Anda miliki. Seberapa jauh apa yang Anda dapatkan?  
Sebaiknya
3. Bagaimana kesiapan Anda terhadap cara instruksi yang diberikan?  
Sangat baik, karena apa yang sudah diajarkan sudah saya lihat dan
4. Bagaimana menurut Anda, seberapa manfaat kegiatan di Klak tersebut untuk kehidupan Anda selanjutnya?  
Kegiatan di Klak sangat bermanfaat dan saya akan lebih aktif dan semangat dalam kerja saya
5. Setelah mengikuti di Klak bela negara tersebut, bagaimana rasa nasionalisme Anda?  
Rasa nasionalisme saya sudah meningkat, saya sudah bangga dengan bangsa saya dan ingin lebih banyak lagi
6. Setelah mengikuti di Klak bela negara tersebut, bagaimana keberanian Anda?  
Kepemimpinan saya bertambah, dan saya sudah tidak takut untuk berbicara
7. Setelah mengikuti di Klak bela negara tersebut, bagaimana rasa percaya diri Anda?  
Rasa percaya diri saya meningkat, saya sudah lebih berani untuk tampil di depan umum



8. Setelah mengikuti diklat bela negara tersebut, bagaimana jiwa kepemimpinan Anda?  
Jiwa kepemimpinan saya meningkat, saya menjadi berani  
menyuarakan kependirian
9. Setelah mengikuti diklat bela negara tersebut, bagaimana jiwa kemandirian Anda?  
Jiwa kemandirian saya meningkat, saya tidak seperti dulu lagi  
lebih mandiri
10. Setelah mengikuti diklat bela negara tersebut, bagaimana rasa kebersamaan/kesetiakawanan Anda?  
Rasa kebersamaan saya meningkat, saya tidak hanya milih  
sahabat saja, saya bergaul sama semua seperti teman saya
11. Bagaimana menurut Anda waktu 3 hari pelaksanaan Bela Negara tersebut?  
Waktu 3 hari menurut saya sudah cukup  
karena di sana full kegiatan positif
12. Bagaimana menurut Anda jika di kelas 11 nanti diadakan kegiatan serupa (dengan materi lanjutan)?  
Sangat penting, saya sangat ingin mengikuti kegiatan tersebut
13. Bagaimana menurut Anda konsumsi yang disediakan panitia?  
Ya sudah cukup baik
14. Bagaimana menurut Anda pelayanan panitia pelaksana?  
Sudah bagus
15. Bagaimana menurut Anda fasilitas yang disediakan di BRIGIF 16 KEDIRI?  
Maukudkan Skripsi





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

Kampus 1 - GKB 1 Lantai 1 - J. D. Raya Tuguwatu No. 200 Malang

Nomor : ET/40774/PPN/UMM/VI/2018  
Lamp. :  
Perihal : *Ditinjau Observasi dan Pengambilan data*

Malang, 16 Juli 2018

Kepada Yth : Kepala Sekolah SMK Sora Boyolangu Tulungagung  
Jl. Mastrip No. 100, Kates, Sorot, Boyolangu, Kab. Tulungagung - Jawa  
Timur 66235  
Di-  
Tempat

Honorable/Alaikum Wa, Wa,

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ini menyetujui kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan tinjauan dan memberikan masukan untuk melakukan observasi dan pengumpulan data di SMK Sora Boyolangu Tulungagung, kepala sekolahnya

Nama

KHUSNAINI

NISN

201719346341012

Program Studi

MAGISTER KEHIDUKAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Tempat

ANALISIS KEHIDUKAN PROGRAM DIKLAT DI LA NEGARA SEBAGAI PENGUJIAN KARAKTER DI SMK SORA TULUNGAGUNG

Demikian surat permohonan dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Honorable/Alaikum Wa, Wa,

  
Direktur Program Pascasarjana

Tembusan :

1. Ketua Prodi Magister Kehidupan dan Pengembangan Kurikulum
2. Arsip

## Lampiran 8

### Tabel Pengumpulan Data

NO	ASPEK TERKAIT	NARASUMBER
<b>Perencanaan Kebijakan Pendidikan Bela Negara</b>		
1.	Apa masalah yang melatar belakangi dikat Bela Negara di SMK Sore Tulungagung ?	<p>(W/WK/P1.1/4 Februari 2019)</p> <p>Diklat Bela Negara dilaksanakan utamanya oleh siswa baru. Siswa baru ini latar belakangnya adalah siswa lulusan SMP, belum mengenal karakter kedisiplinan Bela Negara. Sesuai dengan PPDB yang tersaring dan perarturan di SMK Sore, semua yang diterima wajib mengikuti bela Negara dengan harapan karakter dari SMP itu berubah menjadi kenal karakter disiplin Bela Negara BRIGIF untuk memasuki SMK Sore.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p> <p>(W/KT/P1.2/6 Februari 2019)</p> <p>“Mewujudkan tujuan undang undang sistem pendidikan nasional, yakni pengembangan watak dan peradaban bangsa sebagai tujuan eksistensial, pencerdasan kehidupan bangsa sebagai tujuan kolektif dan pengembangan potensi peserta didik sebagai tujuan individual”.</p> <p>“Informasi yang melimpah, dunia kerja yag terus berubah dan penuh persaingan, ekspansi budaya dan teknologi dari luar negeri dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks”</p> <p><b>Rizki Romli</b></p>

2.	<p>Apa saja tujuan dengan adanya diklat Bela Negara di SMK Sore Tulungagung</p>	<p>( W/WK/P2.1/4 Februari 2019)</p> <p>Mengubah dari sifat kekanak kanak an, menjadi sikap dewasa untuk menghormati seorang yang lebih Tua, seorang Guru dan orang siapa saja, terutama yang menjadi pembinanya.</p> <p>“Dengan terselenggaranya kegiatan penguatan pendiikan karakter Bela Negara di BRIGIF MEKANIS 16 WIRAYUDHA KEDIRI bagi siswa baru SMK SORE TULUNGAGUNG diharapkan dapat meningkatkan moral dan akhlaq bagi siswa-siswi di sekolah ini”</p> <p><b>Puji Hartono</b></p> <p>( W/KT/P2.2/6 Februari 2019)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai – nilai universal dan budaya bangsa dan religous</li> <li>2. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa</li> <li>3. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri ,kreatif,berwawasan kebangsaan</li> <li>4. Membekali peserta didik dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara</li> <li>5. Menanamkan nilai – nilai kejuangan dan keprajuritan kepada generasi penerus bangsa pada umumnya , kepada generasi akademisi pada khususnya demi kelanjutan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan</li> <li>6. Membentuk karakter peserts didik yang memiliki sikap , mental , pengetahuan dan keterampilan managemen ,kemampuan fisik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab</li> <li>7. Terbentuknya sikap dan perilku kebangsaan peserta didik :</li> </ol> <p>A kognisi dengan pemberian pengetahuan tentang proxy war.</p>
----	---	--

		<p>B afeksi dengan pemberian penghayatan melalui simulasi, audio visual, observasi , sehingga menimbulkan kesadaran terhadap kondisi bangsanya</p> <p>C psikomotor dengan pemberian pengalaman berupa praktek sehingga mereka siap untuk bertindak</p> <p><b>Rizki Romli</b></p>
3.	<p>Apa saja acuan perundangan yang digunakan sebagai formulasi kebijakan Bela Negara di SMK Sore Tulungagung ?</p>	<p>( W/WK/P3.1/4 Februari 2019)</p> <p>Undang undang pemerintah tentang pembinaan karakter yang di kemudian dimasukkan kedalam kurikulum.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p> <p>( W/KT/P3.2/6 Februari 2019)</p> <p>“UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan Karakter.</p> <p>Surat Tugas Bapak Kepala SMK SORE Tulungagung tentang Tim Penguatan Pendidikan Karakter untuk Siswa SMK SORE Tulungagung Akhir Semester Gasal ”</p> <p><b>Rizki Romli</b></p>
4.	<p>Bagaimana langkah Kepala Sekolah dalam mendapatkan dukungan dari orang tua murid maupun komite sekolah ?</p>	<p>( W/WK/P4/4 Februari 2019)</p> <p>Kalau pembinaan menuju ke hal baik tentunya orang tua, komite, sangat menyetujui. Langkahnya melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendaftaran awal masuk sebelum siswa mendaftar</li> <li>2. surat edaran bagi siswa yang sudah masuk</li> <li>3. sosialisasi pembiayaan anggaran diklat Bela Negara. Dengan biaya per siswa kurang lebih 380 ribu rupiah dengan subsidi dari sekolah berkisar 260 ribu rupiah.</li> </ol>

		<b>Puji Hartono</b>
<b>5.</b>	Siapa saja yang di tunjuk untuk pelaksana diklat tersebut ?	<p>( W/WK/P5.1/4 Februari 2019)</p> <p>Pendidikan Diklat Bela Negara itu sendiri dari BRIGIF 16. Sedangkan, pendidikan Kedisiplinan Bela Negara lanjutan dari Tim dari Kesiswaan, kedisiplinan dan tim ekstrakurikuler yang saling kesinambungan. Bela Negara lanjutan ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yakni bulan desember dan juni.</p> <p>Dengan sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. siswa yang tidak masuk tanpa keterangan diatas 5 dalam satu semester.</li> <li>2. Siswa yang kurang sopan kepada Guru</li> <li>3. Siswa yang terekam kurang disiplin di piket.</li> </ol> <p><b>Puji Hartono</b></p> <p>( W/KT/P5.2/6 Februari 2019)</p> <p>Mengacu surat tugas Kepala SMK Sore tentang tim Pendampingan Penguatan pendidikan karakter Bela Negara di BRIGIF 16 Wirayudha Kediri terdiri 16 guru pendamping dan 11 dari tim Kesiswaan, kedisiplinan serta tim ekstrakurikuler.</p> <p>Dengan peserta Penguatan pendidikan karakter Bela Negara di BRIGIF 16 Wirayudha Kediri, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa siswi baru (kelas X) dari gugus 1 s.d. gugus 21</li> <li>2. Siswa kelas XI dan XII yang tidak mengikuti kegiatan Penguatan pendidikan karakter Bela Negara di BRIGIF 16 Wirayudha Kediri lanjutan di setiap akhir semester.</li> </ol> <p><b>Rizki Romli</b></p>
<b>6.</b>	Mengapa diklat Bela Negara direncanakan dilaksanakan di luar	<p>( W/WK/P6/4 Februari 2019)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar siswa mengenal lingkungan luar, baik siang maupun malam sebagai contoh dunia militer</li> <li>2. Luas BRIGIF 16 yang memadai</li> </ol>

	sekolah ?	<p>3. Outbond yang memerlukan tempat luas untuk aktivitas kegiatan cinta tanah air.</p> <p>4. Karena kegiatan diklat bela negara ini model semi militer, 50 % disesuaikan untuk pelajar dan sisanya disesuaikan untuk militer.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p>
<b>Implementasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara</b>		
1.	Mengapa pihak sekolah memilih BRIGIF 16 WIRAYUDHA sebagai tempat pelatihan diklat Bela Negara?	<p>(W/WK/I 1/4 Februari 2019)</p> <p>Ternyata BRIGIF lahannya paling luas daripada yonif, yakni terdiri dari 3 bataliyon.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p>
2.	Bagaimana keterpaduan hierarki antara SMK Sore Tulungagung dengan BRIGIF 16 WIRAYUDHA ?	<p>(W/WK/I 2/4 Februari 2019)</p> <p>Selalu berhubungan dan saling mengingatkan kalau di SMK ada masalah, kedisiplinan ini sudah dilakukan apa belum khususnya dalam berbagai acara kegiatan sekolah.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p>
3.	Bagaimana Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan dapat dilaksanakan pada BRIGIF 16 WIRAYUDHA ?	<p>(W/WK/I 3.1/4 Februari 2019)</p> <p>Nah kebijakan peraturan ini mengikuti sana, disesuaikan dengan sana. Jadi kita pesan peraturan kedisiplinan, ini agak ketat contohnya seperti itu. Seperti itu untuk menjaga konsistensi kebijakan ini. Sebagaimana ada pembinaan karakter malam, terus berlanjut baik itu di masyarakat, keluarga dan ini lho hasil pembinaan karakter BRIGIF 16.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p> <p>(W/WK/I 3.2/6 Februari 2019)</p> <p>Sebagai contoh dalam diklat ada pendidikan <i>PROXY WAR</i>. Pada proxy war ini anak-anak mendapatkan langsung materi dari kapten berupa ke Indonesiaa, wawasan lebangsaan, pengenalan infanteri, dan tugas militer. Bagaimana generasi dirusak, sehingga yang menjaga negara tidak hanya TNI, tapi juga</p>

		<p>penerus bangsa.</p> <p><b>Rizki Romli</b></p>
4.	<p>Bagaimana aturan kepatuhan dari badan pelaksana saat kegiatan diklat Bela Negara ?</p>	<p>(W/WK/I 4.1/4 Februari 2019)</p> <p>Namanya militer kepatuhan adalah harga mati, jadi tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p> <p>(W/KT/I 4.2/6 Februari 2019)</p> <p>Untuk menjaga kerahasiaan program latihan di kawasan militer foto pun tidak boleh diambil secara bebas, tidak boleh ada yang membawa Hp. Semua dilaksanakan dengan baik, bahkan fotopun difotokan oleh sana.</p> <p><b>Rizki Romli</b></p>
5.	<p>Apa saja contoh jenis kegiatan untuk menerapkan nilai-nilai Bela Negara di BRIGIF 16 WIRAYUDHA?</p>	<p>(W/WK/I 5.1/4 Februari 2019)</p> <p>Anak dibuat patuh terhadap waktu, adzan subuh semua berangkat bersama. Kemudian senam pagi dengan diberi persiapan 10 menit, lalu istirahat bersih-bersih, dan makan pun secara tepat waktu. Ada pula permainan sebagai selingan hiburan kepada anak-anak. Tentunya harus menghormati bendera setiap apel pagi.</p> <p><b>Puji Hartono</b></p> <p>(W/KT/I 5.2/6 Februari 2019)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sholat</li> <li>2. Senam pagi</li> <li>3. Pembersihan</li> <li>4. rangkaian outbound</li> </ol>



		5. sholat 6. binsik siang 7. makan siang 8. materi proxy war 9. materi wasbang 10. makan pagi 11. fun game 12. kegiatan selesai Gambar: <b>(Terlampir)</b>
6.	Bagaimana Akses formal pihak luar untuk mengamati diklat Bela Negara tersebut?	(W/WK/I 6/4 Februari 2019) Pihak luar masyarakat diperbolehkan untuk mengamati masuk langsung ke dalam lingkungan sekolah sebelum di kirim ke BRIGIF 16. <b>Puji Hartono</b>
<b>Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara</b>		
1.	Sejauh mana kesesuaian capaian kebijakan (output dan outcomes) yang dihasilkan dari proses implementasi dengan indikator yang telah ditetapkan ?	(W/WK/E 1.1/4 Februari 2019) Sudah tercapai. Ketertiban kedisiplinan dapat dilihat dari buku pelanggaran, minimnya siswa yang terlambat. Serta dari sisi sopan santun, menghormati guru melalui 3S (senyum, salam dan sapa). <b>Puji Hartono</b> (W/KT/E 1.2/6 Februari 2019) Cukup sekali dalam mendisiplinkan siswa. Jika output siswa menanti peraturan maka, bisa dilihat dari prosesntase siswa yang masuk dan keluar dari angkatan sebelum ada kebijakan dan angkatan sesudah mengikuti kebijakan. <b>Rizki Romli</b>  ( W/BK/E 1.3/11 Februari 2019) Sejauh mana capaian kebijakannya, sudah sesuai dengan penyampaian awal sosialisasi.

		<b>Rizki Izwar</b>
2.	Apakah hasil yang diinginkan dari diklat Bela Negara sudah tercapai ?	<p>(W/WK/E 2.1/4 Februari 2019) Sudah tercapai <b>Puji Hartono</b></p> <p>(W/KT/E 2.2/6 Februari 2019) hasil diklat Bela Negara sudah tercapai. Jika diambil persikap siswa sulit. Kalau dari outputnya, jika dibandingkan lulusan sekarang dengan lulusan belum adanya diklat berbeda jauh. Sebelumnya siswa dari kelas X ada 20 kelas sampai di kelas XII ada 17 kelas , sedangkan yang lulusan diklat ini sampai lulus masih utuh 20 kelas. Selain itu penyerapan tenaga kerja lebih banyak anak-anak yang di brigifkan daripada belum, karena anak yang di terima di DU/DI bukan anak yang pandai tapi berkarakter baik. <b>Rizki Romli</b></p> <p>(W/BK/E 2.3/11 Februari 2019) Secara garis besar sudah, terkait dengan tingkat kedisiplinan siswa. Namun pasti ada sedikit yang belum berubah. Selanjutnya ada pantauan khusus pada siswa yang belum banyak berubah. Makanya perlu diadakannya Diklat Bela Negara tambahan bagi siswa yang melakukan pelanggaran banyak. <b>Rizki Izwar</b></p>
3.	Bagaimana efektifitas diklat Bela Negara tersebut dengan kegiatan penanaman Bela Negara yang lain di SMK Sore Tulungagung ?	<p>(W/WK/E 3.1/4 Februari 2019) Sangat efektif dilihat dari berkurangnya siswa yang melanggar peraturan sekolah. Selain itu untuk menjaga efektifitas tersebut mengingklutkan kedisiplinan BRIGIF 16 secara berkelanjutan di peraturan sekolah. <b>Puji Hartono</b></p> <p>(W/KT/E 3.2/11 Februari 2019)</p>

		Sejauh mana capaian kebijakannya, sudah sesuai dengan penyampaian awal sosialisasi. <b>Rizki Izwar</b>
4.	Bagaimana strategi untuk lebih meningkatkan kinerja implementasi kebijakan tersebut?	(W/WK/E 4.1/4 Februari 2019) Kesipilinan pendidikan karakter harus dilaksanakan sevara berkelanjutan di sekolah. Guru harus memberikan contoh disiplin waktu juga, salah satunya adanya tugas piket guru dan staf. <b>Puji Hartono</b>  (W/KT/E 4.2/11 Februari 2019) Sejauh mana capaian kebijakannya, sudah sesuai dengan penyampaian awal sosialisasi. <b>Rizki Izwar</b>

Keterangan Kode (W/WK/E 2.1/ TGL)

W : wawancara  
D : Dokumentasi  
WK : Wakil kepala sekolah  
KT : Ketua  
BK : Guru BK  
P : Perencanaan  
I : Implementasi  
E : evaluasi